

MENTERI ERICK:

Utang PTPN Group Rp 48 T akan Direstrukturisasi

Oleh Nasori dan Triyan Pangastuti

JAKARTA – Pemerintah akan merestrukturisasi utang Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) atau PTPN Group yang saat ini mencapai Rp 48 triliun. Di sisi lain, guna menjaga arus kas (*cash flow*) perusahaan dalam melaksanakan program pemerintah, PTPN Group tahun ini juga akan mendapatkan dana talangan Rp 4 triliun dari pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan pemerintah agar PTPN Group bisa membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan, terutama komoditas gula.

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap utang PTPN Holding (PTPN Group) yang saat ini total mencapai Rp 48 triliun, juga memberi dana talangan sebesar Rp 4 triliun untuk tahun ini. "Nanti ada program restrukturisasi besar sendiri di PTPN seperti yang kami lakukan di Krakatau Steel. Mungkin ini akan saya sampaikan lebih detail, khususnya PTPN untuk program kelanjutan," ujar Menteri Erick saat menyampaikan paparannya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (9/6).

Menurut dia, sejumlah langkah lain sudah mulai dilakukan Kementerian BUMN untuk mengurangi beban perusahaan PTPN Group, di antaranya pemangkasan jumlah anggota direksi. "PTPN juga dalam kondisi yang berat. Karena itu, dengan segala hormat, kami melakukan



Erick Thohir

efisiensi besar-besaran di PTPN. PTPN IX-IV jumlah direksinya harus kami pangkas, yang bukan *holding* akhirnya hanya satu (direksi)," ungkap Erick. Dalam struktur organisasi baru atau manajemen anak usaha PTPN Group umumnya hanya diisi satu direksi dan dua senior executive vice president (SEVP).

Meskipun PTPN Group memiliki beban utang hampir Rp 48 triliun, Kementerian BUMN

tetap meminta PTPN Group untuk tetap mendukung program pemerintah terkait keberadaan inti plasma seperti di pertanian tebu rakyat maupun perkebunan lain yang padat karya. Artinya, program inti plasma tidak akan dihentikan. Apalagi, saat ini banyak rantai distribusi bahan pokok yang melalui PTPN, khususnya gula yang mencapai 800 ribu ton. "Inilah yang kami jaga jangan sampai harga bahan pokok ini (gula) anjlok," tandas Erick.

Lebih lanjut Menteri Erick menuturkan, pemerintah memiliki khusus agar PTPN Group membantu pemerintah mewujudkan swasembada gula. Untuk itu, Kementerian BUMN telah membentuk klaster industri perkebunan dan kehutanan yang di dalamnya terdiri atas PTPN Group dan Perhutani (dan Inhutani). "Mereka harus disinergikan supaya swasembada gula ke depan bisa dilakukan. Hal ini mengingat kebutuhan gula konsumsi saat ini mencapai 3,50 juta ton setiap tahunnya," jelas Menteri Erick.

Erick menjelaskan, apabila PTPN Group memiliki lahan tebu 130 ribu hektare (ha), kemudian ditambah lahan inti plasma rakyat 140 ribu ha, sehingga total terdapat lahan 270 ribu ha, belum lagi dengan lahan milik Perhutani. "Kalau setiap 1 ha bisa produksi 7 ton tebu, bukan tidak mungkin PTPN Group nantinya bisa menjadi tulang punggung pemerintah untuk membuat Indonesia bisa swasembada gula yang sekarang ini selalu diwarnai isu impor dan impor terus menerus," jelas Erick.

Produksi Gula

Sebelumnya, Direktur Utama PTPN Group Muhammad Abdul Ghani optimistis target produksi 1 juta ton gula selama musim giling

tebu tahun ini bisa tercapai. PTPN Group telah menyiapkan izin operasional giling dan mobilisasi aktivitas tenaga kerja di sejumlah anak usaha yang memproduksi gula. Dengan produksi sebesar 1 juta ton tersebut, PTPN Group berharap bisa berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga stabilitas harga gula di Tanah Air.

Pabrik gula (PG) di PTPN Group secara bertahap telah memulai giling pada 30 Mei 2020 dimulai dari PG Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur, kemudian dilanjutkan ke PG yang lain sesuai perencanaan dan strategi giling. Total areal tanaman tebu milik PTPN (PTPN IX, X, XI, XII, XIV, II, VII) maupun milik petani tahun ini sekitar 168 ribu ha dan diproyeksikan mampu menghasilkan tebu untuk digiling 12,20 juta ton. Target pencapaian produksi gula 1 juta ton dengan tingkat rendemen pada kisaran 8% yang bersumber dari bahan baku tebu di Jawa dengan 84% di antaranya berasal dari petani tebu rakyat.

Saat ini, PTPN Group secara konsolidasi merupakan salah satu perusahaan perkebunan terbesar di dunia berdasarkan total lahan konsesi perkebunan seluas 1,17 juta ha. Produk komoditas PTPN Group mencakup komoditas anak perusahaan yang beragam terdiversifikasi antara lain kelapa sawit, tebu, karet, teh, kopi, tembakau, dan kakao, serta produk hilirnya masing-masing. Per 31 Maret 2020, areal tanaman PTPN III (Persero) dan anak perusahaan didominasi oleh tanaman kelapa sawit 593.935 ha, tanaman karet 146.345 ha, tanaman tebu 62.583 ha, serta areal teh 30.512 ha.



Konsumsi BBM

Petugas SPBU COCO Pertamina kawasan Gandaria mengenakan sarung tangan dan pelindung wajah saat bertugas mengisi Bahan Bakar Khusus, Pertamina-92 untuk kendaraan roda empat, Jakarta, Selasa 9 Juni 2020. PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III mencatat konsumsi BBM untuk wilayah Jawa bagian Barat mulai mendekati konsumsi rata-rata kebutuhan harian normal sebelum diberlakukannya kebijakan di rumah saja pada Maret 2020. Sejak akhir pekan lalu, konsumsi BBM jenis Premium, Pertalite, Pertamina, Pertamina Turbo di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mencapai 23 ribu Kiloliter per hari.

Ketersediaan Beras Hampir 4 Juta Ton

JAKARTA-Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan pangan khususnya beras melimpah. Ketersediaan beras pada minggu pertama Juni 2020 pada posisi 3,578 juta ton yang tersebar di Perum Bulog 1,485 juta ton, penggilingan 1,363 juta ton, pedagang 0,730 juta ton, belum lagi stok yang cukup besar di industri hotel restoran dan catering (horeka) serta rumah tangga.

Kementan menyebutkan tidak benar stok beras mulai menipis pada Juni 2020, masyarakat hendaknya tidak terkecoh dengan informasi yang tidak benar. Kepala Bulet Distribusi dan Cadangan Pangan Kementan Risfaheri mengatakan, stok cadangan beras

pemerintah (CBP) di Perum Bulog mengacu rekomendasi dari rakortas adalah 1-1,500 juta ton dan saat ini CBP di Bulog 1,485 juta ton dan angka tersebut akan terus bertambah. Secara rinci, stok beras di masyarakat berada di Bulog, penggilingan, pedagang, horeka, dan rumah tangga. "Data terbaru stok beras minggu kesatu Juni 2020 adalah Bulog 1,485 juta ton, penggilingan 1,363 juta ton, pedagang 0,730 juta ton, dan stok cukup besar di horeka dan rumah tangga," kata dia.

Data pengadaan beras Bulog per 8 Juni 2020 setidaknya ada 21.667 ton beras telah terangkut dan saat ini masih terus berlangsung. Terkait luasan sawah dan panen yang akan berlangsung

hingga akhir tahun, Kementan terus melakukan monitoring dan analisa ketat dengan menggunakan data metode kerangka sampel area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS). "Masa tanam kedua sudah dimulai, mudah-mudahan beras bagi masyarakat akan tercukupi. Tidak perlu risu dan panik, beras akan hingga akhir tahun," kata Risfaheri.

Menurut perhitungan KSA BPS, pada Juni 2020 luasan lahan panen 742 ribu hektare (ha) dengan produksi gabah mencapai 3,390 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,950 juta ton beras. Secara kumulatif, tahun ini per Juni total luasan lahan panen mencapai 5,829 juta ha dan beras tersedia 16,800 juta ton. (d)

INVESTASI US\$ 9,7 JUTA

Pertagas Mulai Konstruksi Proyek Pipa Gas BOB Siak

JAKARTA – PT Pertamina Gas (Pertagas), perusahaan transmisi dan distribusi gas terafiliasi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, berkomitmen menyelesaikan pembangunan infrastruktur gas di Indonesia. Salah satu proyek yang saat ini memasuki masa konstruksi adalah pembangunan dan pemanfaatan pipa gas bumi ke BOB (Badan Operasi Bersama) Siak Pusako dengan estimasi investasi US\$ 9,7 juta.

Untuk melancarkan pelaksanaan proyek, pada 5 Juni 2020 Pertagas melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan salah satunya dengan melakukan peninjauan lapangan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kabupaten Siak, Riau.

Menurut siaran pers yang diterima *Investor Daily*, Selasa (9/6), hadir dalam inspeksi lapangan tersebut sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Siak yang terkait dengan proyek. Diantaranya, Kabid Administrasi Perencanaan Azmarman Yohanto, Kadis Transnekar Amin Budyadi, Kabid Tata Ruang Dinas PU TARUKIM Ferdiansyah Fadli, dan Kabid P3KLIK Dedi Susanto.

Selain melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Siak, Pertagas melalui pelaksanaan konstruksi proyek yaitu PT PDC secara aktif melakukan sosialisasi kepada warga terdampak aktivitas proyek. Humas PDC Budhi Baru mengatakan

sosialisasi dilakukan oleh pihak PDC mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga ke tingkat warga.

"Kami ingin memastikan warga yang terdampak aktivitas proyek ini memahami arti penting dari pembangunan proyek pipa gas ini," ujarnya.

Selain menyosialisasikan kepada warga, pihak PDC juga melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan sejumlah elemen masyarakat dan kelompok media lokal. Salah satunya adalah LSM Team Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN RI). Daniel L Gultom, Wakil Ketua FPII Setwil Riau, dalam pertemuan tersebut menyatakan memahami akan pentingnya pembangunan pipa gas yang berada di Kabupaten Siak.

Daniel mengatakan langkah komunikasi yang dilakukan ini dapat mengurangi kesalahpahaman berbagai pihak terhadap aktivitas proyek. "Karena itu, berbagai elemen masyarakat harus mendapat informasi dengan baik sehingga tidak muncul persepsi-persepsi yang salah," katanya.

Suriani Siboro, Sekretaris DPW Riau TOPAN RI, menyampaikan bahwa dengan adanya komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat, diharapkan pelaksanaan pembangunan proyek ini akan dapat berjalan dengan baik. "Karena kami memahami, bahwa proyek ini harus berjalan. Di sisi lain, agar warga terdampak juga tidak mengalami kesalahan informasi," ujarnya. (es)

Pertamina EP Cepu Optimistis

Proyek JTB Beroperasi Tepat Waktu

JAKARTA – PT Pertamina EP Cepu (PEPC) optimis proyek unitisasi Jambaran-Tiung Biru dapat selesai tepat waktu dan beroperasi di pertengahan 2021. Walaupun Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melihat ada indikasi keterlambatan dalam pengerjaan proyek ini.

Direktur Utama PEPC Jamsaton menuturkan, pihaknya memahami adanya kekhawatiran SKK Migas terkait potensi mundurnya Proyek JTB. Pasalnya, SKK Migas bisa saja memperkirakan dengan asumsi skenario terbuka mengingat dampak pandemi Covid-19 terhadap pengerjaan proyek-proyek migas nasional.

Diakuiinya, ada beberapa kendala dalam pengerjaan Proyek JTB yang memang berpotensi menyebabkan keterlambatan. Namun pihaknya berupaya melakukan inovasi untuk meminimalkan potensi keterlambatan tersebut. "Yakni dengan melakukan penyesuaian jadwal konstruksi dan *material on site* tetapi dengan tetap mempertahankan target *onstream* pada Juli 2021," kata Jamsaton di

Jakarta, Senin (8/6).

Jamsaton menjelaskan, kendala yang dihadapi ini yakni keterbatasan tenaga kerja ahli yang bersedia turun ke lapangan lantaran kekhawatiran tertular Virus Covid-19. Kemudian, adanya keterbatasan mobilisasi pekerja akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai pencegahan penyebaran virus. Adanya masa karantina yang diberlakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mengurangi hari kerja efektif.

"Ketiga hal itu mengakibatkan kebutuhan tenaga kerja di lapangan tidak maksimal sehingga tidak bisa melakukan *speed up* konstruksi," ujar dia.

Tak hanya itu, lanjut dia, proses pabrikasi barang-barang di beberapa negara terhenti akibat adanya pembatasan total (*lockdown*) yang diberlakukan di negara tersebut. Di negara yang tidak menjalankan *lockdown*, proses pabrikasi berjalan lambat karena pembatasan jam kerja dan transportasi material, termasuk pabrikasi di Indonesia. (ayu)

ACSET

member of ASTRA

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ACSET INDONESIA Tbk

Kami, Direksi PT ACSET Indonesia Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan "Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2020, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPS LB"). Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK No. 15"), Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah RUPST dan RUPS LB, sebagai berikut:

1. Lokasi, tempat dan tanggal:

- Hari/Tanggal : Senin, 8 Juni 2020
- Waktu : 14.11 WIB s.d 15.47 WIB
- Tempat : Grand Ballroom United Tractors, Jalan Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur

2. Agenda RUPST:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan 2019, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- 2) Penetapan Penghargaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019;
- 3) Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan;
- 4) Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2020-2021; dan
- 5) Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

- Presiden Direktur : Jeffrey G. Chandrawijaya
- Direktur : Elijawati

4. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST:

- Presiden Komisaris : Frans Kesuma

4. Agenda RUPS LB:

- 1) Perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar Perseroan;
 - 2) Persetujuan atas penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"); dan
 - 3) Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan.
5. - **Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat RUPS LB:**
- Presiden Direktur : Idot Supriadi
 - Direktur : Elijawati
- **Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPS LB:**
- Presiden Komisaris : Frans Kesuma
6. - Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah 523.460.380 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh) saham/ suara atau setara dengan 74,78% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.
- Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS LB adalah 523.460.380 (lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh) saham/ suara atau setara dengan 74,78% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

7. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap agenda RUPST dan RUPS LB. Terhadap Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam RUPST dan RUPS LB, sebagai berikut:

8. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dan RUPS LB adalah sebagai berikut:
 - Keputusan RUPST dan RUPS LB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
 - Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15, diatur bahwa Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST dan RUPS LB, namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - Pemegang saham yang tidak setuju atau memberikan suara blanko (abstain) atas usul diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara.
 - Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan.

9. Hasil pengambilan keputusan RUPST:

	Setuju	Abstain	Tidak Setuju	Total Setuju (Setuju+Abstain)
Agenda 1	523.383.320 suara / 99,99%	-	77.060 suara / 0,01%	523.383.320 suara / 99,99%
Agenda 2	523.460.380 suara / 100%	-	-	523.460.380 suara / 100%
Agenda 3	517.795.280 suara / 98,92%	-	5.665.100 suara / 1,08%	517.795.280 suara / 98,92%
Agenda 4	517.718.220 suara / 98,90%	-	5.742.160 suara / 1,10%	517.718.220 suara / 98,90%
Agenda 5	523.460.380 suara / 100%	-	-	523.460.380 suara / 100%

10. Keputusan RUPST adalah sebagai berikut:

a. Agenda Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global *PricewaterhouseCoopers*), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Februari 2020, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et discharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pertanggungjawaban yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2019, sepanjang tidak terdapat tindakan tersebut tercemar dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Tahun Buku 2019.

b. Agenda Kedua

- Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Jakarta, 10 Juni 2020

PT ACSET INDONESIA Tbk

Direksi